

# ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



# WHO CABUT STATUS DARURAT COVID-19

WALI KOTA  
DENPASAR  
INGIN KUNJUNGAN  
WISMAN YANG  
BERKELAS  
Hal. 5



PEMKAB BADUNG  
SERAHKAN HIBAH  
LEMBAGA ADAT  
UNTUK LESTARIKAN  
SENI BUDAYA  
Hal. 7



HAL  
3

# Presiden ke-5 RI Megawati Akan Buka Pawai Pesta Kesenian Bali 2023

**K**epala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani mengungkapkan pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) 2023 akan dibuka oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Presiden ke-5 Republik Indonesia dijadwalkan akan hadir untuk membuka dan melepas peed aya (pawai) yang akan digelar di Jalan Raya Puputan,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan pawai atau yang disebut peed aya itu akan berlangsung di sisi selatan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, pada 18 Juni 2023.

“Teknis pelaksanaan tak jauh berbeda dengan pawai tahun sebelumnya, mengambil start di Jalan Ir Juanda berbelok ke Jalan Raya Puputan hingga finish di depan kantor DPRD Bali,” kata Sulastriani.

Nantinya di lokasi yang dihadiri Megawati Soekarnoputri itu

akan disajikan kesenian berupa garapan seni tradisi, klasik, dan kerakyatan yang disesuaikan dengan tema yang diusung pada Pesta Kesenian Bali tahun ini.

Pemprov Bali melalui Disbud Bali sendiri sudah menyusun kegiatan dalam tema Segara Kerthi: Prabhaneka Sandhi atau Samudera Cipta Peradaban, yang berarti upaya pemuliaan laut sebagai sumber kesejahteraan semesta yang menjadi asal mula lahirnya suatu peradaban.

Tema tersebut tidak hanya ditampilkan dalam pawai yang dihadiri Megawati Soekarnoputri, melainkan menjadi acuan bagi 18.974 orang seniman yang akan berpartisipasi dalam Pesta Kes-



Jajaran Dinas Kebudayaan Bali saat menjelaskan persiapan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-45 tahun 2023, Denpasar, Kamis (4/5/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

enian Bali 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara seni terbesar di Pulau Dewata ini akan berlangsung sebulan, dimana tahun ini dijadwalkan dari 18 Juni-16 Juli 2023.

Adapun penampilan seniman selain pada pawai yaitu pagelaran, lomba, parade, pameran, loka-

karya, sarasehan, dan pemberian penghargaan pengabdian seni dan pekan kebudayaan daerah.

Setelah nantinya Pesta Kesenian Bali ditutup 16 Juli dilanjutkan oleh kegiatan seni lainnya yaitu Festival Seni Bali Jani ke-5 tahun 2023 yang akan menampilkan kesenian dengan paduan moderen. (ant)

## Pemprov Bali Akan Keluarkan Perda Soal Penerapan Kuota Wisman



Gubernur Bali Wayan Koster saat menjelaskan soal rencana pemberlakuan kuota kunjungan wisman, Badung, Jumat (5/5/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

**PEMERINTAH** Provinsi (Pemprov) Bali akan segera mengeluarkan peraturan daerah (perda) mengenai pemberlakuan kuota kedatangan wisatawan mancanegara (wisman), agar dapat menyaring wisatawan yang berkualitas.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster usai Semi-

nar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 di Kabupaten Badung, Jumat.

“Pengendalian pariwisata supaya pariwisatanya tidak pariwisata massal murah, seperti yang kita lihat kasus-kasus belakangan. Karena itu akan diberlakukan

sistem kuota bagi wisatawan mancanegara yang ke Bali. Belum diberlakukan, peraturan daerah dulu,” kata dia.

Kepada media Wayan Koster mengatakan belum rampung untuk teknis pemberlakuan kuota wisman, namun yang pasti akan diberlakukan kriteria-kriteria tertentu.

“Apakah dibatasi 7 juta wisman misalnya (per tahun) dengan kriteria-kriteria tertentu, jadi diperketat. Misalnya harus punya apa saja, termasuk minimum uang yang dibawa di tabungan, jangan sampai cuma bawa Rp10 juta cukup buat seminggu tahu-tahu di sini sebulan,” ujarnya.

Berkaca dari tindakan-tindakan nakal wisman di Pulau Dewata, Wayan Koster menyimpan ketakutan bahwa nantinya ketika uang yang dibawa wisatawan tersebut habis, maka mereka akan melakukan tindakan yang tidak seharusnya.

Untuk mengantisipasi itu maka pemberlakuan kuota menjadi solusi. Yang pasti, lanjutnya, kebijakan yang akan dituangkan dalam perda itu tidak akan dibatasi bagi negara-negara tertentu, melainkan fokus pada jumlah kuota keseluruhan.

Sebagai acuan Wayan Koster mengambil angka kunjungan pada masa sebelum pandemi COVID-19 yaitu 6,3 juta wisman per tahun.

“Nah ke depan kita akan hitung, bukan pariwisata yang sama ini, pariwisata yang berkualitas ini untuk menjaga budaya Bali dan kearifan lokal yang harus bermartabat, karena itu ini ada pengambilan data kembali secara lebih rinci untuk mengatur wisman yang masuk ke Bali,” tuturnya.

Konsep pengendalian pariwisata yang berkualitas ini juga disinggung oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang turut hadir dalam Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. (ant)

# Dispar Bali Sambut Keputusan WHO Cabut Status Darurat COVID-19

**DINAS** Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali menyambut pencabutan status darurat COVID-19 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pемыayun di Denpasar, Senin, mengatakan kabar ini menggembirakan bagi dunia pariwisata karena mereka kian optimis target kunjungan terpenuhi, meskipun secara resmi satgas COVID-19 nasional belum mengumumkan langkah Indonesia.

"Bagaimanapun juga di Indonesia masih ditangani satgas, sehingga nanti penjabarannya seperti apa kita tinggal melaksanakan. Tapi dari satu sisi, komponen pariwisata sangat

menyambut gembira hal ini sehingga hal ini lebih memudahkan pergerakan wisatawan dari seluruh dunia ke Bali," kata dia.

Kepada media, Tjok Bagus menilai kondisi ini sangat efektif dalam rangka mendatangkan wisatawan mancanegara apalagi Pemprov Bali memiliki target kunjungan wisman sebanyak 4,5 juta kunjungan di tahun 2023.

Hingga saat ini, kata dia, setidaknya 1.484.000 wisatawan mancanegara sudah melakukan perjalanan ke Pulau Dewata dari Januari-April 2023, dengan kunjungan tertinggi didominasi Australia, disusul India, Rusia, Singapura, Inggris, Amerika, Malaysia, Korea Selatan, Jerman, kemudian China.

Disinggung soal rencana Pemprov Bali memberi kuota

untuk kedatangan wisman, Tjok Bagus sebut itu tidak mempengaruhi target-target untuk wisatawan, melainkan bentuk pemerintah dalam menyaring wisman berkualitas.

"Kuota bukan jumlah, artinya kualitas. Selama ini kan kualitas itu yang diinginkan karena pak gubernur sudah menyiapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Semua berstandar, termasuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020

tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, bagaimana kita tekan pariwisata yang berkualitas dan bermartabat," jelasnya.

Lebih lanjut, berkualitas yang dimaksud terlihat dari bagaimana nantinya wisatawan yang masuk mampu menghargai budaya lokal dan tradisi di Bali, termasuk menjaga lingkungan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. (ant)



Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pемыayun saat diwawancara soal tanggapan atas dicabutnya status darurat COVID-19 terhadap pariwisata, Denpasar, Senin (8/5/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari



Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins di Denpasar, Kamis (11/5/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

**GUBERNUR** Bali Wayan Koster saat bertemu dengan Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins yang berkunjung dalam rangka mengakhiri tugasnya di Indonesia membahas kerja sama mengenai energi bersih.

"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan energi bersih diantaranya potensi untuk bus listrik dan kita memang mengarah ke sana. Ke depan akan kita tingkatkan, sehingga bisa jadi ruang kerja sama antara Pemprov Bali

dengan Pemerintah Inggris," kata dia di Denpasar, Kamis.

Koster menjelaskan selama ini Bali dan Inggris melalui kedutaan besarnya memiliki kerja sama yang baik, banyak yang sudah berjalan dan bidang energi bersih menjadi tawaran baru.

Disampaikan olehnya, energi bersih yang mereka bahas dalam pertemuan itu tidak hanya sebatas bus listrik, namun lebih jauh membahas Light Rail Transit (LRT) kereta listrik yang

## Bali Jajaki Kerja Sama Energi Bersih Dengan Inggris

digadag-gadag pemerintah.

"LRT yang akan kami kembangkan di Bali saat ini sedang proses feasibility study (studi kelayakan) dan nanti setelah ini kami akan tindaklanjuti dengan pihak mana saja kerja sama pelaksanaan program transportasi publik khususnya LRT ini," jelas Gubernur Bali.

Selain membahas energi bersih baik kendaraan listrik maupun transportasi publik, tawaran ke depan yang akan ditindaklanjuti Pemprov Bali adalah di bidang pendidikan dan digitalisasi.

Di bidang pendidikan yaitu program dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi anak-anak dan pegawai yang bergerak di sektor

pariwisata, dan digitalisasi soal bagaimana mengoptimalkan program yang sudah ada sebelumnya.

"Kaitannya dengan digitalisasi di Bali sedang berjalan program ekonomi kreatif dan digital yang dicanangkan beberapa tahun lalu tapi belum berjalan optimal. Ke depan kita laksanakan tentu tawaran dari Dubes Inggris jadi skema kerja sama yang akan dilaksanakan," tutur Koster.

Dubes Inggris Owen Jenkins yang sudah berada di posisi tersebut selama empat tahun menegaskan bahwa negaranya memang berkomitmen untuk bekerja sama erat dalam sektor energi bersih terutama untuk kendaraan listrik. (ant)

# Pemkot Denpasar Antisipasi Arus Balik Lebaran Sampai Tingkat Desa

**P**emerintah Kota Denpasar, Bali, melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi arus balik Lebaran 2023 agar tidak sampai mengganggu aspek keamanan bahkan hingga tingkat desa/kelurahan.

“Kami sudah mengkoordinasikan dengan perangkat desa/kelurahan dengan kadus-kadus (kepala dusun). Sudah dilakukan upaya kolaborasi sampai tingkat terbawah,” kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Senin.

Selain itu untuk mengantisipasi arus balik Lebaran sudah disiapkan sejumlah posko terpadu. Posko terpadu tersebut diantaranya Pos Uma Anyar, Pos Terminal Ubung, Pos Pelabuhan Sanur, dan Pos Pelabuhan Serangan.

Melalui posko terpadu Pemerintah Kota Denpasar bersama tim terpadu berupaya untuk fokus mengantisipasi dan menanggulangi segala ken-



dala yang mungkin muncul selama pelaksanaan arus mudik maupun arus balik Lebaran.

Aspek yang difokuskan tak saja keselamatan lalu lintas jalan dan aspek keselamatan angkutan laut, selain itu juga aspek keamanan dan ketertiban agar arus mudik dan arus balik berlangsung kondusif.

Pihaknya pun mengharapkan bagi warga yang memasuki Kota Denpasar pada arus balik ini agar dapat mempersiapkan data kependudukan dengan baik.

“Kami pun berkolaborasi dengan semua perangkat daerah sudah dilakukan dengan baik,” ujar Jaya Negara.

Selain memantau arus balik, menurut Jaya Negara, pemantauan juga dilakukan terhadap



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara disela-sela peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Denpasar, Senin (1/5/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

keamanan di tempat wisata.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) arus balik di pintu masuk yakni salah satunya Pelabuhan Benoa.

Kepala Dinas Dukcapil Den-

pasar Dewa Gede Juli Artabrata mengatakan pihaknya masih menunggu jadwal kedatangan kapal yang akan sandar di Pelabuhan Benoa.

Sidak dilakukan untuk antisipasi penduduk pendatang (duktang) yang datang ke Kota Denpasar tanpa identitas. **(ant)**

## Wali Kota Denpasar Serahkan Uang Pembinaan Duta Seni Pawai PKB 2023



Komunitas Seni Naluri Manca yang akan mewakili Kota Denpasar dalam Peed Aya (Pawai) Pembukaan Pesta Kesenian Bali 2023 saat mengikuti proses latihan di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

**WALI** Kota Denpasar, Bali, IGN Jaya Negara meninjau proses latihan dan menyerahkan uang pembinaan kepada Komunitas Seniman Denpasar Naluri Manca yang mewakili Denpasar dalam

Peed Aya (Pawai) Pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) pada Juni 2023.

Jaya Negara saat berbincang dengan perwakilan penari di Denpasar, Senin, menyampaikan

apresiasi dan motivasi untuk Komunitas Seni Denpasar Naluri Manca agar dapat mempersiapkan penampilan terbaiknya.

“Sekilas yang kami lihat dari persiapan pada tahap ini sudah sangat baik dan matang,” ujarnya didampingi Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana.

Komunitas Seni Naluri Manca yang melibatkan 200 talenta kawula muda yang berasal dari sanggar, sekolah, sekaa teruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar tersebut mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp250 juta.

Terkait beberapa catatan kecil dari tim pembina yang perlu diperhatikan, kata dia, agar dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan pawai berjalan sempurna.

“Kami dari Pemerintah Kota Denpasar juga akan terus

mengawal apabila kemudian ada kendala-kendala yang perlu dikomunikasikan bersama,” ujar Jaya Negara.

Ida Bagus Eka Harista selaku ketua panitia pawai dari Komunitas Seni Naluri Manca mengatakan komunitasnya dalam Pembukaan Pawai PKB 2023 akan membawakan tema “Dannacitta Segara” atau Peradaban Multikultur dan Ekonomi Kreatif.

Pertunjukan dalam pawai akan dilakukan dengan berjalan yang melambangkan bentuk dari keharmonisan hidup beragam etnis dan budaya di Kota Denpasar.

“Terkait koreksi yang disampaikan oleh tim pembina PKB dari Provinsi Bali, semuanya menjadi catatan penting bagi kami untuk bahan evaluasi dan referensi, seperti soal durasi tampil serta penampilan lainnya,” kata dia. **(ant)**

# Wali Kota Denpasar Ingin Kunjungan Wisman Yang Berkelas

WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara berharap ada kebijakan tertentu untuk memperketat masuknya wisatawan mancanegara ke Bali sehingga yang berwisata itu merupakan orang-orang yang berkelas.

"Kami sudah sempat komunikasi dengan Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua PHRI Bali bahwa yang dikejar saat ini adalah wisatawan yang berkualitas," kata Jaya Negara disela-sela menghadiri Pasar Rakyat di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, pandangan wisatawan terkait pariwisata Bali itu murah harus segera diubah agar pariwisata dapat memberikan manfaat kepada pelaku ekonomi di Bali dan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat.

"Saya melihat beberapa hotel yang dulu harganya minimal Rp800 ribu semalam tetapi sekarang terjual Rp400 ribu," ujarnya didampingi Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana.



Kini dengan harga kamar hotel yang murah, lanjut dia, meskipun tingkat keterisian (okupansi) 60 persen tidak dapat memberikan keuntungan besar bagi pengusaha hotel.

"Sekarang 60 persen tingkat hunian dengan harga yang dijual murah sekali. Sedangkan dulu dengan hunian 60 persen itu bisa serasa hampir 100 persen," ucap Jaya Negara.

Menurut dia, Bali dapat mencontoh negara-negara lain yang memberlakukan kebijakan dengan memiliki nominal tabungan tertentu baru boleh memasuki negara bersangkutan.

"Kami mengusulkan PHRI agar benar-benar menetapkan harga kamar hotel. Misalnya kelas bintang tiga harusnya ditentukan sekian dan tidak boleh di bawah ketentuan. Jangan sampai ada kesan berlomba-lomba menurunkan harga demi mendapatkan pasar," katanya.

Jika harga kamar hotel tetap



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Denpasar, Jumat (5/5/2023). ANTARA/Ni Luh Rhis-mawati.

murah dikhawatirkan yang tidak memiliki hotel justru bisa lebih beruntung dibandingkan para pemilik hotel. "Intinya kini yang lebih penting kualitas wisman yang harus dikejar," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan kunjungan wisman ke Pulau Dewata pada 2023 dapat

mencapai 4,5 juta jiwa.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 370.832 kunjungan, naik 14,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 323.623 kunjungan. (ant)

## Ombudsman Puji Mal Pelayanan Publik Denpasar Sudah Berbasis Digital



Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma Kota Denpasar, Jumat (5/5/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengagumi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma Kota Denpasar, Bali, yang sudah

menjalankan pelayanan publik dengan berbasis digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Mal pelayanan publik yang

dimiliki Kota Denpasar sudah sangat lengkap dan dapat memberikan kesan 'one stop service'. Pelayanan berbagai jenis perizinan dapat diurus dalam satu pintu," kata Robert Na Endi Jaweng di Denpasar, Jumat.

Perizinan dapat diurus dalam satu pintu tersebut, lanjut dia, dengan memegang prinsip transparansi dari sisi mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya.

Robert mengatakan kehadirannya di Kota Denpasar untuk mencari informasi dan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan pelayanan Kota Denpasar dari kemudahan perizinan dan pelayanan kesehatan khususnya mengenai BPJS Kesehatan

Sementara itu Sekda Kota Denpasar Alit Wiradana menyampaikan Kota Denpasar akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Denpasar pada 2022 telah mendapatkan dua penghargaan nasional dari Ombudsman RI dan menduduki peringkat kelima dengan nilai rata-rata 93,27 kategori Kualitas Tertinggi dari seluruh kota di Indonesia.

"Tahun ini kami akan tingkatkan kembali kualitas pelayanan publik di Denpasar. Harapannya dapat menjadi kota terbaik nasional untuk pelayanan publik. Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama kami," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan langkah yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan BPJS Kota Denpasar untuk mewujudkan capaian UHC 100 persen.

"Hal ini tentu memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kota Denpasar," ujar Wiradana. (ant)

# Sekda Badung: Kurikulum Merdeka Belajar Tuntun Bakat dan Potensi Pelajar

**K**urikulum Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa.

“Ini membawa sistem pendidikan nasional semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat,” ujar dia saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 di daerah itu di Mangupura, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa.

Ia mengatakan pelaksanaan sistem pendidikan Merdeka Belajar merupakan hal yang penting dan fundamental, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan

program Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan kuat.

“Tanpa didukung oleh sistem pendidikan yang kuat dan holistik apa yang menjadi harapan Bapak Presiden Joko Widodo tidak akan bisa diwujudkan,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat dan generasi muda untuk tidak pernah berhenti

belajar, terlebih dengan Kurikulum Merdeka Belajar yang dinilai sebagai sistem pendidikan yang fleksibel.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan generasi muda untuk tidak pernah berhenti belajar, di mana saat ini anak-anak sekarang diberikan ruang belajar sesuai den-

gan bakat minat dan potensinya namun tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila,” kata dia.

Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional, pihaknya ingin memberikan suatu informasi kepada generasi muda terkait dengan berdirinya bangsa Indonesia.

Upaya itu, menurut dia, dapat merefleksikan tantangan yang sudah dihadapi dan mewujudkan tujuan Ki Hajar Dewantara untuk memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

“Ada struktur panjang yang dilalui, salah satunya bagaimana saat itu perjuangan bapak kita Ki Hajar Dewantara yang berjuang mendorong masyarakat Indonesia agar bisa mengenyam pendidikan,” kata Sekda Adi Arnawa. (adv)



Sekda Badung Wayan Adi Arnawa saat memimpin apel peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 di Badung, Selasa (2/5/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

## Kabupaten Badung Adakan Persiapan Sebagai Tuan Rumah ITTSU 2023



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) memimpin rapat ITTSU Tahun 2023 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Rabu (3/5/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali melakukan sejumlah persiapan dan koordinasi terkait dengan rencana penyelenggaraan kegiatan Indonesia Time To Speak Up (ITTSU) tahun 2023 di wilayah tersebut.

ITTSU akan diselenggarakan pada 16 Mei 2023 yang dihadiri oleh bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia dengan total

peserta sekitar 1.600 orang.

“Kabarnya Presiden Joko Widodo akan hadir, sehingga substansinya harus jelas dan pasti. Maka dari itu perlu adanya satu gambaran pasti terhadap persiapan penyelenggaraan ITTSU ini,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.

Selain terkait dengan substansi

acara, katanya, menjelang kegiatan ITTSU berbagai hal lain juga perlu terus dipersiapkan, termasuk para seniman yang akan tampil, sehingga kegiatan itu terlaksana dengan baik dan lancar.

Dia mengatakan ITTSU juga ajang untuk mempromosikan tempat wisata yang ada, khususnya di Badung, dengan harapan bisa mendatangkan ribuan wisatawan.

“Kami Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti ini dalam rangka mendatangkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali, khususnya ke Kabupaten Badung,” kata dia.

Kegiatan ITTSU di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala terdiri atas empat kelompok yang dikemas secara holistik dan terpadu, yaitu Konferensi Pariwisata dan Budaya (Conference on Tourism and Culture), Table Top & Exhibition, Festival Budaya Indonesia, dan Penerapan Teknologi Infor-

masi digitalisasi (D4.0 – G5.0).

Konferensi dalam kegiatan itu untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, bahwa pemulihan ekonomi ditentukan oleh sektor pariwisata karena industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan memberikan efek berganda kepada berbagai sektor industri lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta menambahkan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan sukses.

“Kami akan bekerja sama dengan semua elemen pelaku pariwisata maupun masyarakat untuk turut berpartisipasi dan bergotong royong melalui event (ajang) ini agar dapat berjalan dengan baik dan manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat,” kata dia. (adv)

# Korpri Kabupaten Badung Serahkan Santunan Bagi Pensiunan

**DEWAN** Pengurus KORPRI Kabupaten Badung, Bali menyerahkan santunan ke pensiunan ASN serta sumbangan dana kematian kepada ahli waris ASN yang telah meninggal sebagai salah satu program Korpri Badung yang anggarannya diperoleh dari iuran KORPRI.

"Ini merupakan suatu wujud perhatian dan sumbangsih kami. Jangan dilihat besar kecilnya, namun bagaimana jalinan persaudaraan dan kebersamaan tetap terjalin dengan baik," ujar Ketua Dewan Pengurus KORPRI Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah purna tugas karena sudah berbuat banyak untuk kebaikan Badung.

Oleh karena itu, penyerahan

santunan dana pensiun dan sumbangan dana kematian itu merupakan program KORPRI dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi dan sebagai rasa terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan kepada Pemkab Badung.

"Ini sebagai wujud rasa kebersamaan, karena telah banyak memberikan tenaga dan pikiran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Badung," kata Adi Arnawa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Badung.

Sementara itu, Sekretaris KORPRI Badung I Wayan Wijana menambahkan, dana santunan pensiun itu nominalnya diberikan sesuai dengan golongan pensiun aparatur sipil negara.

Pensiunan dengan golongan IV dan III diberikan santunan



Penyerahan bantuan KORPRI Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

sebesar Rp3,5 juta sedangkan pensiunan ASN dengan golongan II dan I diberikan dana santunan sebesar Rp3 juta dan untuk sumbangan dana kematian diberikan sebesar Rp5 juta

"Kami menyerahkan santunan

kepada 10 pensiunan ASN serta sumbangan untuk 1 ahli waris ASN yang telah meninggal dunia. Jadi total santunan pensiun dan sumbangan dana kematian yang kami salurkan adalah sebesar Rp39 juta," pungkaskan Wayan Wijana. (adv)

# Pemkab Badung Serahkan Hibah Lembaga Adat Untuk Lestarikan Seni Budaya



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan dana hibah kepada lembaga adat. ANTARA/HO-Pemkab Badung

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali, menyerahkan dana hibah kepada lembaga adat sebagai upaya untuk melestarikan seni dan budaya.

Dana hibah senilai lebih dari Rp1,7 miliar itu diserahkan kepada sejumlah lembaga adat yang telah memiliki Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.

"Dana hibah ini merupakan komitmen Pemkab Badung dalam upaya melestarikan seni, adat, agama, dan budaya sebagai bagian dari program prioritas pembangunan kami,"

ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan Pemkab Badung akan terus mengimplementasikan visi-misi pemerintahan yang sudah tertuang dalam program prioritas keberpihakan di bidang adat, seni, agama, dan budaya.

Menurut Adi Arnawa, Kabupaten Badung hidup dari sektor pariwisata yang tidak dapat dilepaskan dari sektor budaya yang menjadi dasar dari aktivitas pariwisata di Badung dan Bali.

Oleh karena itu, pihaknya akan selalu hadir pada organisasi-organisasi kemasyarakatan terlebih lagi organisasi yang bergerak di bidang seni dan budaya ini seperti dengan menyalurkan bantuan dana hibah tersebut.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini akan memberikan motivasi dan semangat kepada lembaga adat di Badung

untuk tetap melaksanakan swadarmanya dalam mendukung kegiatan adat dan keagamaan," kata dia.

Sekda Adi Arnawa menambahkan bahwa dana hibah itu merupakan salah satu program dan kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait pelestarian seni, adat, agama, dan budaya.

"Ke depan kami mengharapkan Dinas Kebudayaan dan Widya Sabha untuk mendata semua kelompok-kelompok sehingga tercipta suatu keadilan bagi masyarakat. Kami sangat mengedepankan keadilan, sehingga sepanjang ada permohonan melalui proposal kepada pemerintah, tentu kami akan berupaya membantu," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha menjelaskan, dana hibah yang diberikan kepada lembaga adat itu berdasarkan pengajuan proposal kepada Pemkab Badung. (adv)

# Pemkab Badung Minta Warga Tidak Ragu Gunakan Kendaraan Listrik

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali mengajak masyarakat agar tidak ragu dalam menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu lagi beralih menggunakan kendaraan listrik, agar Bali dapat menjadi destinasi wisata yang hijau dan lebih ramah lingkungan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan salah satu upaya Pemkab Badung untuk mendorong penggunaan listrik oleh masyarakat adalah dengan mendukung penuh PLN dalam memperbanyak ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah Badung.

Yang terbaru, PLN telah menyelesaikan pembangunan SPKLU di area Pusat Pemerintahan Badung (Puspem Badung). SPKLU bertipe Ultra Fast Charging (UFC)

200 KiloWatt (KW) itu dibangun untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik kendaraan mobil listrik khususnya yang melintas di Kawasan Puspem Badung.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan dengan keberadaan SPKLU yang semakin bertambah, maka diyakini masyarakat akan semakin tertarik untuk memiliki kendaraan listrik di masa yang akan datang.

“Dukungan kami salah satunya dengan menyediakan lokasi yang bisa dijangkau masyarakat khususnya pengguna kendaraan listrik yang melewati daerah di seputaran Puspem Badung, agar tidak sulit mencari lokasi SPKLU,” kata dia.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana mengungkapkan, 2 unit SPKLU yang dibangun di Puspem Badung telah menambah jumlah SPKLU keseluruhan se-Bali menjadi 48 unit.



Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum PLN yang berada di area Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupura Mandala. ANTARA/HO/Pemkab Badung

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum itu terdiri dari 10 unit tipe UFC, 23 unit tipe medium charging, 9 unit tipe fast charging dan 6 unit bertipe slow charging.

“Infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik akan terus bertambah, dan kami menargetkan tahun 2023 ada

penambahan SPKLU sebanyak 12 Unit yang tersebar di seluruh Bali,” ungkap dia.

Ia menambahkan, PLN berkomitmen mendukung pemerintah yang berinisiatif menyiapkan tempat untuk menempatkan SPKLU PLN di lokasi-lokasi strategis untuk memudahkan pemilik kendaraan listrik. (adv)

# Pemkab Badung Terus Majukan Pariwisata Dengan Tetap Lestarkan Alam



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali berkomitmen untuk terus memajukan sektor pariwisata khususnya di wilayah Canggü dan Tibubeneng Badung yang saat ini terus diminati wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian alam.

“Kami menegaskan tetap berkomitmen menjaga dan

mengembangkan industri wisata Canggü dan Tibubeneng dengan tetap mengendalikan alih fungsi lahan, agar harmonisasi alam, masyarakat dan budaya tetap lestari, di tengah masifnya gempuran investor yang ingin membuka usaha,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pengembangan industri pariwisata di Desa Tibubeneng akan diupayakan tetap mengedepankan konsep Desa Wisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa langsung mendapatkan keuntungan dari kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayahnya.

“Ke depannya kami juga akan membantu masyarakat yang ada di wilayah itu untuk membuat homestay di rumahnya masing-masing karena kami ingin masyarakat Canggü dan Tibubeneng menjadi tuan di rumah sendiri,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, saat ini Pemkab Badung juga sedang melakukan simulasi dan menyusun skenario konsep pembangunan infrastruktur lalu lintas secara mendalam sebagai solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Canggü, Tibubeneng dan sekitarnya.

“Ini karena untuk opsi pel-

ebaran bahu jalan ke kanan dan kiri maupun pembangunan fly over sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, mengingat lahan yang sangat terbatas,” ungkap dia.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah memberikan hibah tanah seluas 67 are bagi Desa Adat Tandeg dan Desa Tibubeneng.

Menurut Bupati Giri Prasta, pemberian hibah tanah itu sejalan dengan kebijakan Pemkab Badung dalam membangun infrastruktur di bidang budaya dan pemerintahan untuk mendukung kawasan Tibubeneng menjadi daerah wisata yang berkelanjutan.

“Atas nama Pemerintah Badung dan masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali karena telah menghibahkan aset tanah pemprov untuk perluasan Pura Dalem Desa Adat Tandeg dan untuk Kantor Perbekel serta GOR Desa Tibubeneng,” pungkask dia. (adv)

# Pemkab Badung Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.

“Opini WTP ini adalah sebuah pemicu bagi kami di jajaran pemerintah dan DPRD Badung untuk selalu konsisten melaksanakan kegiatan di daerah terutamanya tentang APBD yang harus terbuka, transparan dan taat azas,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Rabu.

Bupati Giri Prasta mengatakan atas raihan itu pihaknya juga berterima kasih dan mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Bali yang sebelumnya terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Badung hingga opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 tersebut bisa diraih.

“Kami bersyukur Badung kembali meraih WTP. Capaian ini tidak terlepas dari pendampingan BPK RI Perwakilan Bali sehingga kami di Badung dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, sesuai dengan UU no.15 tahun 2004 dan UU no. 12 tahun 2006, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali tahun 2022.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.

“Kami Juga melihat kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” ungkap dia.



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima LHP BPK RI dari Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Ia menambahkan berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2022, atas rekomendasi BPK untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022, terdapat 11.020 rekomendasi.

Dari rekomendasi tersebut sebanyak 10.539 rekomendasi

atau 96,09 persen telah ditindaklanjuti dengan semestinya. Sedangkan 378 rekomendasi atau 3,43 persen belum sesuai rekomendasi, 16 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 87 rekomendasi dari keseluruhan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. (adv)

# Pemprov Bali Hibahkan Tanah Ke Desa Adat di Kabupaten Badung



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kanan) bersama Gubernur Wayan Koster (kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

**PEMERINTAH** Provinsi Bali menghibahkan tanah aset milik pemerintah provinsi kepada Desa Adat Ambengan dan Desa Adat Ayunan di wilayah Kabupaten Badung, Bali.

Tanah aset Pemprov Bali yang dihibahkan itu terdiri dari tanah

seluas 3,3 hektar untuk Desa Adat Ambengan serta untuk Desa Adat Ayunan dengan luas tanah 70 are. Selain itu Pemprov Bali juga menyerahkan 22 sertifikat dengan rincian 17 di Desa Adat Ambengan dan 5 sertifikat di Desa Adat Ayunan.

“Kami Pemerintah Kabupaten Badung dan masyarakat Desa Adat Ambengan dan Desa Adat Ayunan kami berterimakasih kepada Bapak Gubernur Wayan Koster dan Pemerintah Provinsi Bali karena telah menghibahkan tanah aset Pemprov untuk Desa Adat Ambengan dan Desa Adat Ayunan,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis.

Tanah yang dihibahkan kepada dua desa adat itu nantinya akan digunakan sebagai kawasan Pekarangan Desa, Pura Prajapati, Setra, Balai Subak, Balai Banjar serta Pura Melanting.

Bupati Giri Prasta menjelaskan selain berterima kasih pihaknya juga berharap Gubernur Bali agar selalu diberikan kesehatan sehingga mampu menunaikan semua tugas dan kewajibannya di masa jabatannya.

“Saya berdoa agar bapak Gubernur senantiasa diberikan kesehatan dan masyarakat diberikan kekuatan untuk mendukung program Beliau,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali juga telah memberikan hibah tanah seluas 67 are bagi Desa Adat Tandeg dan Desa Tibubeneng di Badung.

Bupati Giri Prasta menjelaskan pemberian hibah tanah itu sejalan dengan kebijakan Pemkab Badung dalam membangun infrastruktur di bidang budaya dan pemerintahan untuk mendukung kawasan Tibubeneng menjadi daerah wisata yang berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali karena telah menghibahkan aset tanah pemprov untuk perluasan Pura Dalem Desa Adat Tandeg dan untuk Kantor Perbekel serta GOR Desa Tibubeneng,” kata dia. (adv)

# Pemkab Badung Bantu Petani Tingkatkan Kualitas Produk

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali, memfasilitasi para petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dengan pendampingan oleh penyuluh pertanian.

“Aspek kualitas dan kualitas dan ini penting sekali yang dapat dijaga dengan cara dilakukan pendampingan dari penyuluh pertanian agar apa yang menjadi harapan pembeli dalam mendapatkan produk berkualitas yang berkelanjutan bisa kami wujudkan,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan selain berupaya menjaga kualitas dan kuantitas produk pertanian, pihaknya juga meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memfasilitasi bertemunya petani dengan pembeli terkait dengan adanya permasalahan pemasaran hasil produksi pertanian para petani Badung.

“Seperti menyangkut masalah rutinitas produksinya, kualitas produksinya itu harus bisa dijaga dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Badung kepada para petani sehingga benar-benar menjaga aspek kontinuitas,” kata dia.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan Pemkab Badung sudah mendorong melalui Perumda Pasar dan Pangan bertugas membeli produksi petani, sehingga dipastikan hasil produksi petani dibeli oleh Perumda Pasar dengan grade yang jelas A,B dan C.

Menurutnya dari situ nantinya pembeli tidak perlu datang ke petani. Selain itu Perumda Pasar akan diupayakan dapat menjadi seperti loka pasar agar pembeli cukup datang di situ untuk membeli produk pertanian.

“Di satu sisi petani mendapat kepastian pembayarannya karena hasilnya dibeli oleh perumda



Kegiatan temu usaha pertanian Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

pasar dan di pihak buyer ada kepastian dari sisi kontinuitas, kualitas dan kuantitasnya,” ungkap dia.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana menambahkan dengan kondisi geografis Kabupaten Badung sangat

mendukung untuk pengembangan potensi pertanian dalam arti luas.

“Tentunya itu memiliki peluang pasar yang sangat besar yang perlu digarap dengan serius sehingga hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Badung,” tambah dia. (adv)

# Pemkab Badung Beri Atensi Kepada Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Agar Tepat Sasaran



Wabup Badung I Ketut Suiasa. ANTARA/HO-Pemkab Badung

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali, memberikan atensi serius terkait dengan proses penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi agar dapat optimal dan tepat sasaran.

“Kami memberikan perhatian yang serius terkait dengan pengelolaan, penyediaan dan distribusi gas LPG 3 kg dalam rangka melakukan pengendalian inflasi

di Kabupaten Badung,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Migas di Badung, Senin.

Ia mengatakan dalam penyaluran LPG 3 Kg, setelah dicermati dan didalami ada satu sistem alur yang harus dibenahi dan harus

dibuat satu pengaturan tata kelola secara baik di Badung.

Menurutnya hal itu harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan elpiji yang bersubsidi dan jangan sampai LPG 3 kg yang bersubsidi diterima atau dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.

Wabup Suiasa menjelaskan salah satu upaya lain yang harus dilakukan adalah memastikan kapasitas LPG 3 kg bersubsidi. Kapasitas itu adalah ketersediaan dan pasokan gas elpiji yang cukup bagi masyarakat di Badung.

“Yang kami akan distribusikan pada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang bersubsidi itu,” kata dia.

Ia menambahkan apabila kapasitas itu tidak terpenuhi, otomatis akan sulit bagi peman-gku kepentingan di daerah dalam mengendalikan inflasi, karena ketika kapasitas tidak terpenuhi

maka permintaan tidak seimbang dengan ketersediaan yang akan mengakibatkan harga akan naik.

“Ini akan berat bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, petani dan nelayan. Maka itulah melalui rapat ini kami berupaya agar analisa memenuhi kapasitas terkait kebutuhan LPG 3 Kg ini,” tambah Wabup Suiasa.

Selain itu, untuk mewujudkan penyaluran LPG bersubsidi maka juga akan disusun basis data yang bersifat by name by address sehingga dapat diketahui siapa penerima subsidi beserta dimana alamatnya dan berapa kuota yang dibutuhkan.

“Inilah yang nanti kami buat-komitmen bersama antara pemerintah yang menangani soal energi dan migas dengan jajarannya di Provinsi Bali yaitu Pertamina. Kami akan berkoordinasi dan bersinergi sehingga kebutuhan akan LPG bisa terpenuhi dan tepat sasaran,” kata Wabup Suiasa. (adv)

# Hari Pendidikan Nasional di Gianyar Gelar Lomba Kreativitas PAUD

**PUSAT** Kegiatan Gugus (PKG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, menggelar berbagai lomba kreativitas dan aktivitas di kalangan anak-anak Balita dalam memeriahkan Hari Pendidikan Nasional.

“Kegiatan lomba kreativitas dan aktivitas pendidik dan peserta didik PAUD se-Kecamatan Payangan telah dilaksanakan sejak 13 Maret 2023. Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional kita laksanakan Gebyar PAUD sambil memberikan hadiah kepada pemenang lomba,” ujar Ketua PKG PAUD Payangan Ni Wayan Ariasih, di Gianyar, Selasa.

PKG PAUD Kecamatan Payangan sampai saat ini beranggotakan 21 lembaga PAUD yang terdiri dari 13 Taman Kanak-kanak dan 8 Kelompok Bermain dengan total peserta didik mencapai 603 orang siswa/siswi.

Di samping pemberian hadiah dan penampilan dari

anak-anak PAUD se-Kecamatan Payangan, dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian bingkisan kepada anak kurang mampu sebanyak tiga orang dari masing-masing Lembaga se-Kecamatan Payangan.

Sementara itu, Bunda PAUD Kecamatan Payangan Ny. Saren Adi Astuti Widana mengatakan tujuan dari Gebyar PAUD tersebut adalah untuk melihat kreativitas aktivitas pendidik di Kecamatan Payangan.

“Gebyar PAUD ini tujuannya untuk melihat kreativitas, aktivitas pendidik dan peserta didik di Kecamatan Payangan untuk menciptakan generasi emas yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Tentunya untuk mempersiapkan anak-anak masa depan harapan bangsa sebagai pemimpin-pemimpin hebat,” katanya.

Ia mendukung program satu desa satu PAUD dan menjelaskan bahwa program tersebut telah berjalan di Kecamatan



Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Dewa Manuaba sedang memberikan piala kepada para anak usia dini (PAUD) atas kreativitas dan aktivitasnya. (ANTARA/HO-Humas Gianyar)

Payangan.

“Di Kecamatan Payangan ada 21 PAUD, yang terdiri dari 1 Paud Negeri Hindu Widya Kumara yang ada di Desa Bukian selebihnya merupakan PAUD milik desa atau Yayasan. Jadi untuk program 1 PAUD 1 Desa di Kecamatan Payangan sudah

terpenuhi,” tegasya.

Di lain sisi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Dewa Manuaba mewakili Bunda PAUD Kabupaten Gianyar mengaku bangga melihat kreativitas anak-anak PAUD dalam memainkan musik Baleganjur ataupun Marcing Band. (ant)



Apel gladi kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Kamis (11/5/2023). FOTO ANTARA/HO-Pembkab Tabanan

**BADAN** Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali melakukan apel gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di SMPN 5 Tabanan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana.

“Sesuai kajian risiko bencana, di Kabupaten Tabanan terjadi 10 ancaman, di antaranya gempa bumi, tsunami, longsor, angin kencang. Oleh karena itu, upaya-

upaya penanggulangan bencana wajib dilakukan dengan sarana guna mengurangi risiko bencana yang dilakukan secara kolaboratif,” kata Sekda Tabanan I Gede Susila, Kamis, di Tabanan.

Sejak disahkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, katanya, penanggulangan bencana dari perspektif responsif ke preventif harus menjadi cara pikir.

Menurutnya cara tindak

## BPPD Tabanan Apel Kesiapsiagaan Bencana

bersama dan dijadikan sebagai budaya, di mana edukasi kebencanaan harus dimulai sejak dini.

“BNPB melalui program kesiapsiagaan bencana telah menginisiasi sejak tahun 2007, memprakarsai suatu gerakan nasional untuk menggugah seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengadakan uji rekonstruksi, uji SOP, uji sirine peringatan dini, latihan evakuasi mandiri secara serentak pada tanggal 26 April 2023,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa, prilaku dan budaya untuk siaga dari ancaman bencana sangat harus disadari dan penting dilakukan latihan evakuasi mandiri.

Hasil survei di Jepang, kata dia, 34,9 persen masyarakat bisa selamat dari ancaman bencana karena diri sendiri, 31,9 persen karena diselamatkan keluarga, 28,1 persen karena pertolongan tetangga dan hanya 5 persen bisa selamat oleh pertolongan regu selamat.

Ia menambahkan, keterpaduan antara pemerintah, pemda, TNI, Polri dengan masyarakat dan dunia usaha perlu dijalin dan ditingkatkan, terutama dalam menghadapi ancaman bencana di daerah.

“Oleh karena itu kami mengimbau agar seluruh jajaran dan pihak terkait serta masyarakat agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan,” demikian I Gede Susila. (ant)

# Pendapatan UMKM di Festival Semarapura Capai Rp2,1 Miliar

**BUPATI** Klungkung I Nyoman Suwirta menyatakan omzet 102 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jualan selama Festival Semarapura ke-5 tahun 2023 di Klungkung, Bali mencapai Rp2,1 miliar.

"Dalam kegiatan ini tidak hanya muncul kebahagiaan dan kegembiraan saja, tetapi ada omset dan perputaran uang sekitar Rp2,1 miliar yang diraup oleh semua UMKM dan ini masih (hitungan) kotor. Artinya bahwa ada dampak positif untuk UMKM kita," kata dia sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Bali, Selasa.

Bupati mengatakan perhelatan Semarapura Festival ke-5 Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka Hari Puputan Klungkung ke-115 dan HUT Kota Semarapura ke-31 yang berlangsung lancar berkat kerja sama semua pihak.

Berdasarkan keterangan Bupati Klungkung festival yang digelar selama empat hari sejak 28 April sampai 1 Mei 2023 tersebut berhasil menyedot sekitar 46 ribu pengunjung per harinya. Kunjungan tersebut tercatat merata, baik di stand kuliner maupun stand UMKM lainnya.

"Dari data yang saya bawa selama empat



hari ini data pengunjung yang hadir setiap hari itu rata-rata 46 ribu. Artinya, masyarakat kita sangat merindukan kebersamaan kebahagiaan dan semuanya ingin bangkit dari keterpurukan," kata dia.

Bupati berharap festival tersebut mampu berkontribusi positif terhadap penguatan UMKM dan promosi pariwisata Klungkung. Karena itu, ia sendiri merekomendasikan Festival Semarapura tetap dilanjutkan pada tahun yang akan datang meskipun Klungkung akan dipimpin oleh Bupati yang baru karena dirinya sudah tak jadi Bupati lagi.

Atas kelancaran Festival Semarapura ke-5 Bupati Suwirta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.

Selama pelaksanaan Festival Semarapura 2023 yang berlangsung sejak Jumat (28/4) hingga Senin (1/5) juga menyajikan beberapa atraksi budaya yang melibatkan sekitar 650 orang seniman dan juga artis. **(ant)**

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memberikan sambutan pada acara penutupan Festival Semarapura ke-5 di Klungkung, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung

# HUT Bangli, Bali ke-819 Diramaikan Kontes Nasional Anjing Kintamani



Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta memberikan sambutan pada kontes nasional anjing Kintamani, Bali. ANTARA/HO-Pemkab Badung

**HARI** Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, ke-819 diramaikan dengan kontes nasional anjing Kintamani di alun-alun kota, sebagai upaya pelestarian anjing khas daerah.

"Anjing Kintamani yang telah diakui sebagai Anjing Ras Dunia oleh Federation Cynologique Internationale (FCI), maka Pemer-

intah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mengadakan Kontes Anjing Kintamani," kata Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, demikian siaran pers Diskominfo Bangli, Minggu.

Kontes anjing merupakan ajang yang sangat penting sebagai media untuk meningkatkan kualitas sekaligus sebagai

wahana informasi dan komunikasi bagi para komunitas, masyarakat dan pemerintah.

"Oleh sebab itu kegiatan ini memiliki nilai positif dan ekonomis. Dengan kontes ini, para penggemar anjing Kintamani Bali, agar lebih menyayangi anjingnya seperti layaknya anjing ras lain, mengingat anjing Kintamani jika dipelihara dengan perawatan yang baik akan mampu menunjukkan intelegensi dan penampilan yang tidak kalah dengan anjing ras lainnya," tambah Bupati Bangli.

Bupati Sedana Arta menjelaskan, anjing Kintamani pada 23 Februari 2012 diakui keberadaannya di tingkat Asia oleh Asian Chancel Union (ACU). Pemkab Bangli menguatkan dengan Perda nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 02 tahun 2010 tentang Kawasan Pelestarian

Anjing Kintamani. Pada Perda nomor 04 tahun 2015 terdapat pengakuan terhadap tiga jenis warna dan campurannya pada anjing Kintamani, yaitu warna putih, hitam, coklat dan anggrek serta pengembangan kawasan pelestarian menjadi Desa Sukawana, Siakin dan Pinggan.

Pada September 2019, anjing Kintamani mendapat pengakuan sebagai anjing ras dunia dari Federation Cynologique Internationale (FCI) yaitu organisasi internasional yang membawahi induk organisasi anjing trah seluruh dunia.

"Guna mendapatkan pengakuan yang definitif dari Federation Cynologique Internationale (FCI) di tahun 2029, kita harus bahu membahu dan serius memberikan perhatian sehingga pengakuan tersebut dapat kita raih," ujar Bupati. **(ant)**

# Bupati Karangasem Ingin PMI Terus Inovasi Layani Kemanusiaan

**BUPATI** Karangasem, Bali I Gede Dana meminta Palang Merah Indonesia (PMI) setempat untuk terus berinovasi demi memberi pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

"PMI perlu selalu berbenah diri dan selalu melakukan inovasi yang tentunya bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan, serta dapat dijadikan sebagai ruang bagi pembaharuan pencapaian program kerja melalui perencanaan yang lebih terpadu bagi kemajuan PMI," katanya saat membuka Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) Tahun 2023 PMI Karangasem di Karangasem, Selasa.

Gede Dana mengatakan Muskerkab ini penting untuk monitoring dan evaluasi program PMI Karangasem, baik mengenai target maupun pencapaiannya.

Melalui ini, menurutnya, PMI dan Pemkab Karangasem

dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan seperti penyediaan darah di rumah sakit dan bantuan penanggulangan bencana melalui pengiriman relawan yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu.

"Tentunya ada upaya dan usaha kita untuk senantiasa berbenah diri dan melakukan monitoring dan self assessment. Harus kita sadari bersama, peran dan fungsi PMI sangat besar, khususnya pada bidang kemanusiaan. Kita ketahui Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi," ujar bupati.

Dengan demikian, PMI sebagai garda terdepan memiliki peran besar dan sangat dekat dengan masyarakat di Bali wilayah Timur itu.

Ketua Pengurus PMI Karangasem I Nengah Suranten menambahkan tugas pokok



Bupati Karangasem I Gede Dana dalam Muskerkab PMI Karangasem di Karangasem, Bali, Selasa (25/4/2023). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem

PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas-tugas kepalangmerahan.

"Meliputi kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan

pelayanan transfusi darah," ujarnya.

Suranten menjelaskan untuk pelayanan donor darah dilakukan melalui mobil unit keliling atau layanan di UDD RSUD Kabupaten Karangasem untuk memenuhi kebutuhan darah pasien yang di rawat di rumah sakit. **(ant)**

# Disnaker Buleleng dan BPPPMI Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Migran



Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI Bali, Ni Putu Ayu Saraswati saat memberikan materi terkait perlindungan PMI di Buleleng. ANTARA/HO-Kominfosanti Buleleng

**DINAS** Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Bali bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPPMI) menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia menasar kalangan peserta lembaga pelatihan di wilayah tersebut.

"Kepada para peserta yang nantinya berkeinginan menjadi PMI khususnya di Buleleng agar jangan terlalu percaya pada LPK atau agen pem-

berangkatan kerja yang memberikan informasi pekerjaan di luar negeri, namun belum jelas izinnya," kata Sekretaris Disnaker Buleleng, Nyoman Suarjana saat membuka kegiatan sosialisasi bertempat di Aula SMA Negeri 3 Singaraja, Selasa.

Ia mengatakan, para pencari kerja diharapkan lebih teliti mencari informasi agar terhindar dari kasus penipuan. Pencari kerja juga diharapkan berkoordinasi dengan Disnaker Buleleng agar ke depan korban PMI ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Ketika ada agen yang menjanjikan terkait keberangkatan keluar negeri minimal dikordinasikan dahulu kepada kami. Sehingga, kami tahu agen mana saja yang sudah pernah memberangkatkan calon PMI ke luar negeri," tegasnya.

Suarjana menegaskan, LPK itu tugasnya hanya memfasilitasi pelatihan kerja bukan yang memberangkatkan tenaga kerja secara langsung kecuali sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan tertentu.

Oleh sebab itu, pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada LPK melalui lembaga Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) di Buleleng, melalui lembaga ini koordinasi akan terus dijalin sehingga minimal permasalahan yang terjadi selama ini bisa kita tekan.

"Kalau ada LPK yang belum memiliki izin maka akan sulit untuk dipantau kecuali ada laporan dari masyarakat. Tapi jika LPK sudah terdaftar maka sangat mudah untuk dipantau, karena kami selalu melakukan pembinaan dan pemantauan setiap hari," imbuhnya. **(ant)**

# Bupati Jembrana: Opini WTP Hasil Kerja Keras Banyak Pihak

**BUPATI** Jembrana I Nengah Tamba menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan dari BPK yang diraih Pemkab Jembrana merupakan hasil kerja keras banyak pihak.

“Opini WTP dari BPK ini bukan hasil kerja individu, tapi hasil kerja keras semua pihak terkait pengelolaan keuangan daerah dengan baik,” katanya, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Selasa.

Menurut dia, selain eksekutif, DPRD juga turut berperan dalam raihan WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 tersebut.

Saat menyerahkan LHP

tersebut, Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan, berdasar pemeriksaan yang dilakukan, pihaknya menyimpulkan penyusunan laporan keuangan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Bali tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan standar.

“Sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas seluruh laporan keuangan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Bali tahun anggaran 2022,” katanya.

Namun ia juga mengingatkan, opini WTP bukan tujuan akhir, tapi merupakan keharusan bagi pemerintah daerah



Bupati Jembrana I Nengah Tamba (kiri) menerima opini BPK untuk laporan keuangan daerah tahun anggaran 2022, Selasa (9/5).

untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Ia juga menegaskan, kewajiban pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan itu diterima. **(ant)**

# DPRD Bali Bahas Wacana Keterlibatan Bandesa Adat Pada Pemilu 2024



Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Budi Utama bersama perwakilan instansi terkait dan jajaran anggota Komisi I dan IV DPRD Bali usai rapat kerja pembahasan bandesa adat dalam Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (2/5/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati/wsj.

**KOMISI** I dan Komisi IV DPRD Bali membahas dan mencari masukan mengenai wacana keterlibatan bandesa (pimpinan) desa adat dalam Pemilu 2024 bersama para pemangku kepentingan terkait.

“Bandesa dan prajuru (pengurus) desa adat dalam pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri,” kata Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman

Budi Utama di Denpasar, Selasa.

Budi Utama menyampaikan hal tersebut terkait simpulan pendapat DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Kerja tentang Kedudukan Hukum Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat di Bali terkait Pemilu.

Rapat juga dihadiri unsur KPU Bali, Bawaslu Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali,

Biro Hukum dan Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

Menurut Budi Utama, bandesa dan prajuru desa adat tidak berkewajiban mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dalam pemilu.

“Hal ini karena desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat, tidak dapat anggaran dana alokasi yang bersumber dari APBN, melainkan bersumber dari APBD Provinsi Bali dalam bentuk

dana hibah yang tidak mengikat,” ujarnya.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah sistem pemerintahan terbawah. Dalam konteks ini, perangkat desa boleh menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan syarat mengundurkan diri.

“Sedangkan bandesa dan prajuru desa adat bukan merupakan penyelenggara sistem pemerintahan terbawah dalam pemerintahan negara, maka dalam pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak perlu mengundurkan diri,” ujarnya.

Kemudian ketentuan Pasal 32 huruf e, dapat ditegaskan bahwa bandesa dan prajuru desa adat ketika mencalonkan diri dan/atau menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta menjadi calon dalam pilkada tidak dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus parpol. **(ant)**

# BI Sebut "Ecotourism" Layak Jadi Perhatian Pelaku Usaha Pariwisata Bali

**KEPALA** Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan isu ecotourism (pariwisata berbasis lingkungan) sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dari pemangku kebijakan dan pelaku usaha pariwisata di Pulau Dewata.

"Seiring dengan pemulihan sektor pariwisata di Bali, perlu dikelola dengan baik agar ekosistensi lingkungan dan budaya Bali tetap lestari," kata Trisno dalam acara Suryaloka (Survei Biaya dan Laporan Perekonomian Bali Terkini) di Denpasar, Kamis.

Acara Suryaloka juga dirangkaikan dengan Seminar Literasi Ecotourism bertajuk Mengakselerasi Perekonomian Bali melalui Stabilisasi Inflasi dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Ecotourism.

Seminar menghadirkan narasumber Deputy Kepala

Perwakilan BI Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari, Duta Besar Keliling RI Wilayah Pasifik Tantowi Yahya, akademisi Universitas Udayana Prof Dr I Nyoman Sunarta MSI dan Founder Eco Tourism Bali Suzy Hutomo

Menurut Trisno, ecotourism mendorong aktivitas wisata yang ramah terhadap lingkungan dan mewajibkan adanya tanggung jawab dari wisatawan untuk turut menjaga destinasi wisata.

"Prinsip ecotourism sejatinya selaras dengan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan UU Provinsi Bali 2023 untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali melalui perwujudan program Bali Era Baru," ujarnya.

Dengan ecotourism, kata Trisno, pariwisata menjadi bermanfaat untuk lingkungan yang lestari dan jangka



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho bersama Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan para narasumber seminar di Denpasar, Bali, Kamis (11/5/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati/wsj.

panjang serta berkeadilan terhadap lingkungan. "Intinya Bali dapat menjadi hijau yang berkelanjutan," ucapnya.

Trisno menambahkan, sebagai daerah wisata utama Indonesia, perekonomian Bali memiliki ketergantungan

yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut terbukti dari pangsa lapangan usaha terbesar di Provinsi Bali berkaitan dengan pariwisata dan pendukungnya mencapai 51,78 persen terhadap total PDRB. **(ant)**

## PLN: Dua SPKLU 200 kilowatt di Puspem Badung Siap Dipakai



Sebuah mobil milik PT PLN (Persero) sedang mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

**PT PLN (Persero)** menyatakan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tipe Ultra Fast Charging (UFC) 200 kilowatt (kW) di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Bali siap dipakai setelah menyelesaikan uji coba.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi

Bali I Wayan Udayana, di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan SPKLU yang berada di jantung pemerintahan Kabupaten Badung tersebut sudah bisa digunakan untuk melakukan pengisian ulang kendaraan mobil listrik.

Sejak awal, pembangunan SPKLU bertipe UFC 200 kW

tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik kendaraan mobil listrik khususnya yang melintas di kawasan Puspem Badung.

Dua SPKLU yang telah resmi dioperasikan tersebut menambah jumlah SPKLU di Bali sudah mencapai 48 unit yang terdiri dari 10 unit tipe UFC, 23 unit tipe medium charging, 9 unit tipe fast charging, dan 6 unit bertipe slow charging.

"Infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik akan terus bertambah, dan kami menargetkan tahun 2023 ada penambahan SPKLU sebanyak 12 Unit yang tersebar di seluruh Bali," kata Udayana.

Menurut Udayana, PLN berkomitmen mendukung pemerintah dengan inisiatif menyiapkan tempat untuk menempatkan SPKLU PLN di lokasi-lokasi strategis untuk memudahkan pemilik kendaraan listrik.

Di samping itu, PLN juga membuka peluang kerja sama bisnis SPKLU melalui skema franchise bagi mitra yang berminat.

"PLN sudah menyiapkan skemanya termasuk infrastruktur pendukung yakni aplikasi yang akuntabel, sehingga kami mendorong para pelaku usaha yang berminat untuk bersamasama PLN mengembangkan bisnis SPKLU ini," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan akan mendukung penuh PLN dalam memperbanyak ketersediaan SPKLU di masyarakat.

"Dukungan kami salah satunya dengan menyediakan lokasi yang bisa dijangkau masyarakat khususnya pengguna kendaraan listrik yang melewati daerah di seputaran Puspem Badung, agar tak sulit mencari lokasi SPKLU," ujarnya pula. **(ant)**

# Rektor Undiksha Genjot Pelaksanaan MBKM Mandiri

**R**ektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd menggenjot pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mandiri sebagai upaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi pendidikan tenaga kependidikan terbesar di Pulau Dewata tersebut.

“Momentum hari pendidikan nasional harus dijadikan sebagai penguat pelaksanaan MBKM yang telah digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek),” kata Lasmawan saat memimpin apel peringatan Hari Pendidikan Nasional di kampus setempat, Selasa.

Ia mengatakan, Hardiknas harus dimaknai sebagai hari pembebasan bangsa dari kebodohan, keterbelakangan, dan keterpurukan menuju era baru, yaitu menjadi bangsa yang lebih baik untuk generasi ke depan.

Lasmawan juga menyebutkan pendidikan adalah sebagai media, sebagai pilar pembangunan. Instrumen ini tidak boleh runtuh,

melainkan tetap berfungsi untuk menjaga generasi bangsa.

Pihaknya melihat Pendidikan Indonesia saat ini sudah memberikan warna baru bagi masyarakat, terlebih dengan adanya 24 platform Merdeka Belajar yang disampaikan Mendikbudristek.

Platform tersebut dinilai sebagai jawaban atas bagaimana mestinya Pendidikan bangun, dikelola, dan berikan pada masyarakat.

“Tinggal bagaimana semua komponen Pendidikan mampu menerjemahkan dan berada pada rel yang sama dengan kebijakan Mas Menteri. Jika ada yang harus dibenahi mari benahi bersama. Tidak ada orang hebat di dunia ini apabila dia hanya berpikir dia



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. ANTARA/HO/Undiksha

yang hebat. Kehebatan seseorang tercermin dan terbukti apabila mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengajak orang lain untuk menciptakan kehebatan lainnya,” ungkapnya.

Undiksha sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK), kini tidak hanya mencetak calon guru, melainkan juga bidang non kependidikan.

Selama ini langkah yang dilakukan Undiksha sebagai sebuah institusi patuh pada pemerintah termasuk patuh pada kebijakan Kementerian, salah satunya MBKM. (ant)

## Mahasiswa ITB STIKOM Bali Ikuti Kuliah dan Magang di Taiwan



Mahasiswa ITB STIKOM Bali yang melanjutkan kuliah sambil magang di China University of Technology Taipei, Taiwan, saat acara pelepasan di Denpasar, Jumat (28/4/2024). ANTARA/HO-ITB STIKOM Bali.

**SEBANYAK** 21 mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali akan melanjutkan kuliah sambil magang di China University of Technology Taipei, Taiwan, untuk meningkatkan kemampuan diri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

dapat menimba pengalaman internasional.

“Sekarang ini dunia tak ada batas lagi. Siapapun bisa kuliah di manapun dan kapanpun. Adik-adik ini sangat beruntung, kuliah di ITB STIKOM Bali tetapi dalam waktu bersamaan bisa melanjut-

kan kuliah di Taiwan,” kata Rektor ITB STIKOM Bali Dr Dadang Hermawan di Denpasar, Jumat.

Dadang Hermawan menyampaikan kelebihan program itu di antaranya kuliah sambil magang sehingga dari penghasilan selama masa magang bisa untuk membiayai kuliahnya, baik di China University of Technology Taipei maupun biaya kuliah di ITB STIKOM Bali serta memperoleh dua gelar.

“Apalagi program ini sejalan dengan program Pak Menteri, yakni Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sehingga sangat membantu mahasiswa karena setahun magang di luar negeri akan dikonversi menjadi 40 nilai SKS,” ujarnya saat melepas 21 mahasiswa ITB STIKOM Bali itu.

Jadi, kata Dadang, yang total SKS sudah besar, dapat melanjutkan kuliah seperti biasa untuk dapat dua gelar, yakni Sarjana

Komputer (dari ITB STIKOM Bali) dan gelar BIT di China University of Technology Taipei.

“Sedangkan bagi yang baru semester pertama, semester dua, atau semester tiga saya sarankan mundur supaya konsentrasi kuliah di Taiwan, cukup dapat gelar di Taiwan saja,” katanya.

Dadang berharap para mahasiswa ini dapat menjadi contoh generasi muda lainnya untuk berpikir global, memanfaatkan peluang globalisasi guna meningkatkan kemampuan diri di bidang iptek serta menimba pengalaman internasional.

PIC Program Kuliah Sambil Magang di Luar Negeri Rahman Sabon Nama, SE, sebelumnya menyatakan untuk perkuliahan pertama bulan Mei 2023 ini jumlah mahasiswa yang mendapat admission letter dari China University of Technology Taipei sebanyak 23 orang. (ant)